



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
LAMPUNG DAN BENGKULU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO

JALAN A.H. NASUTION NOMOR 116, METRO 34124;
TELEPON (0725) 48803; FAKSIMILE (0725) 48843; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN
TENTANG

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG METRO TAHUN 2025
NOMOR LAP-1/KNL.0503/2026

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat. Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Metro sebagai PPID Tingkat III memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id maupun melalui portal website KPKNL Metro dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro>.

Dengan terbitnya PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Metro secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Metro dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan Terpadu APT KPKNL Metro baik datang langsung maupun melalui surat;
- b. Layanan panggilan telepon melalui nomor (0725) 48803;
- c. Layanan Whatsapp melalui nomor 085266052784;
- d. Gerai Layanan Virtual KPKNL Metro;

- e. Layanan informasi melalui e-mail pada alamat kpknmetro@kemenkeu.go.id. Serta melalui media social diantaranya Instagram (@kpknl_metro) dan YouTube (KPKNL Metro).

3. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, KPKNL Metro dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan Unit in Charge PPID Tingkat III. Seksi Hukum dan Informasi terdiri dari 3 (tiga) orang pegawai yang diantaranya Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 2 (dua) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi ditunjuk menjadi Person in Charge PPID Tingkat III.

4. Permohonan Informasi Publik

Sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022, penyampaian laporan Informasi Publik dilakukan secara tengah tahunan dan tahunan dari seluruh Perangkat PPID secara berjenjang di masing-masing unit eselon I kepada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Sekretariat Jenderal selaku PPID Kementerian Keuangan dan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Atasan PPID Tingkat I DJKN. Dalam hal ini KPKNL Metro selaku Perangkat PPID Tingkat III menyampaikan Laporan Tengah Tahun dan Laporan Tahunan kepada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu selaku Perangkat PPID Tingkat II. Adapun jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh KPKNL Metro sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Permintaan	tidak diproses karena tidak melengkapi syarat	waktu rata-rata pelayanan	Jumlah Permintaan Dikabulkan		Jumlah permintaan ditolak	Alasan permintaan ditolak			Jumlah Keberatan
				sepenuhnya	sebagian		dikecualikan	belum dikuasai	lainnya	
Januari	1	-	8	-	1	-	-	-	-	-
Februari	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
Juli	2	1	5	-	1	-	-	-	-	-
Agustus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-
Oktober	2	-	8	-	2	-	-	-	-	-
November	2	-	10	-	2	-	-	-	-	-
Desember	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik pada eksternal maupun internal pada KPKNL Metro.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholder di lingkup KPKNL Metro, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup KPKNL Metro meliputi:

- Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (BIRO KLI) dan Kantor Pusat DJKN;
- Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor vertikal, media sosial maupun sosialisasi rutin;
- Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Metro melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel, dan lain-lain.

Dibuat di Metro
pada tanggal 5 Januari 2026

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Metro



Ditandatangani secara elektronik
Mughtar Nurwahidzain



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL METRO
TAHUN 2025**

No.	Nama KPKNL	Nomor Registrasi	Tanggal Permintaan Informasi Publik	Nama Pemohon	Jenis Pemohon	Informasi yang Diminta	Kedudukan Hukum Pemohon	Nomor Surat Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan		Lama Waktu Pemberian Informasi (Hari Kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
										Permintaan Informasi diberikan Seluruhnya	Permintaan Informasi Publik Diberikan Sebagian	Permintaan Informasi Publik Ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi Tidak Dikuasai										
1	KPKNL Metro	REG-1/PPID.KN.05.03/2025	20 Januari 2025	Zaenal Abidin	Badan Hukum Indonesia	Lelang	Kabupaten Lampung Tengah	S-133/KNL.0503/2025	6 Februari 2025		√				5									
2	KPKNL Metro	REG-2/PPID.KN.05.03/2025	23 Juni 2025	Nurni	Perorangan	Lelang	Kabupaten Lampung Tengah	S-958/KNL.0503/2025	25 Juni 2025		√				10									
3	KPKNL Metro	REG-3/PPID.KN.05.03/2025	3 Juli 2025	Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen Mitra Sejahtera	Badan Hukum Indonesia	Lelang	Kabupaten Lampung Utara	S-1003/KNL.0503/2025	3 Juli 2025			√	√		1									
4	KPKNL Metro	REG-4/PPID.KN.05.03/2025	9 Juli 2025	Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa	Badan Hukum Indonesia	Lelang	Kabupaten Lampung Tengah	S-1089/KNL.0503/2025	11 Juli 2025		√				2									
5	KPKNL Metro	REG-5/PPID.KN.05.03/2025	23 September 2025	Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa	Badan Hukum Indonesia	Lelang	Kabupaten Lampung Tengah	S-1442/KNL.0503/2025	30 September 2025		√				6									
6	KPKNL Metro	REG-6/PPID.KN.05.03/2025	11 September 2025	Surya Darma	Perorangan	Lelang	Kota Metro	S-1378/KNL.0503/2025	16 September 2025		√				3									
7	KPKNL Metro	REG-7/PPID.KN.05.03/2025	29 September 2025	LBH Mustika Bangsa	Badan Hukum Indonesia	Lelang	Kabupaten Lampung Tengah	S-1443/KNL.0503/2025	30 September 2025	√					1									
8	KPKNL Metro	REG-8/PPID.KN.05.03/2025	29 September 2025	Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa	Badan Hukum Indonesia	Lelang	Kabupaten Lampung Tengah	S-1477/KNL.0503/2025	14 Oktober 2025		√				11									
9	KPKNL Metro	REG-9/PPID.KN.05.03/2025	23 Oktober 2025	Kuasa Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa	Badan Hukum Indonesia	Lelang	Kabupaten Lampung Tengah	S-1529/KNL.0503/2025	30 Oktober 2025		√				5									
10	KPKNL Metro	REG-10/PPID.KN.05.03/2025	03 November 2025	Kuasa Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa	Badan Hukum Indonesia	Lelang	Kabupaten Lampung Tengah	S-1543/KNL.0503/2025	3 November 2025		√				17									
11	KPKNL Metro	REG-11/PPID.KN.05.03/2025	05 November 2025	Kusnadi	Perorangan	Lelang	Kota Metro	S-1580/KNL.0503/2025	7 November 2025		√				2									
12	KPKNL Metro	REG-12/PPID.KN.05.03/2025	15 Desember 2025	Litis Idkha	Perorangan	Lelang	Kabupaten Lampung Tengah	S-1697/KNL.0503/2025	16 Desember 2025		√				1									

Metro, 05 Januari 2026
Plh.. Kepala KPKNL Metro



Ditandatangani secara elektronik
Muchtar Nurwahidzain

